**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Memperhatikan berbagai informasi yang berkembang dalam diskusi-diskusi melaplui media masa baik cetak maupun elektronik yang membahas tentang kondisi bangsa Indonesia dimana yang sering dijadikan tolak ukur adalah masalah perekonomian. Yang menarik dikemukakan bahwa perekonomian Indonesia masih diperhadapkan dengan berbagai persoalan seperti ; Tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, tingkat pengangguran, harga komoditas bahkan ekonomi global yang memicu terbentuknya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam arti adanya system perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Hal ini terbentuk dengan tujuan bersama yaitu menjadikan kawasan yang stabil, makmur, kompetitif, perkembangan ekonomi yang adil mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.Selanjutnya dalam perbincangan–perbincangan sebagian besar ahli ekonomi mengungkapkan bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga menjadi pusat perhatian dunia. Sudah barang tentu merupakan peluang, akan tetapi pada kenyataan bangsa kita masih diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran yang berdampak pada semakin tinggi kesenjangan sosial. Oleh karena itu pemerintah secara terus menerus melakukan berbagai terobosan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian antara lain dengan membuat kebijakan disektor keuangan khusunya dalam pemberian pinjaman untuk mendorong bertumbuhnya UKM, disamping program-program yang melibatkan masyarakat.

Peran dari dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan dan perlu dioptimalkan. Permasalahan kemiskinan juga mulai pudar dengan adanya sumber pemberdayaan dan pemecahan. Dengan itu diperlukan perubahaan menyeluruh yang bersifat sistemik dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu penanganan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan menerapkan sistem pemberian kredit kepada masyarakat.

Pemberian kredit memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat menengah di bawah. Pemberian kredit merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Pemberian kredit dilakukan atas dasar kepercayaan, maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang si salurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu untuk meyakinkan bahwa penerima kredit benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum diberikan kredit terlebih dahulu pemberi kredit melakukan analisis kredit.

Tujuan utama analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kredit. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan membahayakan si pemberi kredit. Dalam hal ini penerima kredit mungkin saja bisa memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebanarnya tidak layak tetapi malah di berikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet. Kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Adanya rentang waktu pengembalian pinjaman menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung pemberi kreditterhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari peminjam.

Pemberi kredit juga tidak hanya tertarik atas kemampuan peminjam untuk membayar kembali tetapi juga berkepentingan kapasitas legalnya untuk melakukan pinjaman. Pemberi kredit hanya memberikan sedikit pinjaman kepada orang yang belum dewasa, karena mereka mungkin ingkar janji kecuali kalau pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan penting. Kalau sebuah pinjaman diberikan kepada orang yang belum dewasa, maka orang tua, wali, atau orang lain yang telah dewasa biasanya diminta untuk ikut penjaminya.

Timbulnya kredit bermasalah selanjutnya dapat mengakibatkan kesulitan bagi pemberi kredit tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada para penerima kredit. Disamping itu kegiatan pengkreditan (berupa bunga, komisi, dan provisi) akan sangat membahayakan tapi, sekalipun mempunyai sumber pendapatan lain melalui proses pendanaan jasa dan perbankan. Dana yang berhasil diperoleh disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam pemberian kredit, dana yang dipergunakan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang berbentuk deposito, tabungan, giro, yang berbentuk jangka pendek. Sedangkan kredit yang dipergunakan oleh bank sebagian besar merupakan pinjaman jangka panjang. Dengan adanya perbedaan waktu, maka timbul unsur ketidakpastian atau resiko atas kredit yang diberikan.

Salah satu instansi pemerintah yang menerapkan program penanggulangan kemiskinan adalah PNPM Mandiri yang merupakan program kegiatan dalam wujud kerangka kebijakan sebagai acuan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilakukan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui tahap pembelajaran masyarakat, tahap kemandirian masyarakat, tahap keberlanjutan pembentukan kelompok masyarakat menjadi modal sosial yang membuka secara penuh dan mendekatkan sumber daya capital atau modal ekonomi langsung kepada masyarakat. Program PNPM Mandiri dimaksudkan selain untuk penanggulanggan kemiskinan masyarakat perdesaan melalui bantuan modal usaha dan penyediaan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi juga merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat dan aparat melalui kegiatan pengambilan keputusan yang demokratis baik dalam perencanaan pelaksanaan dan pelestarian hasil-hasil pembangun. Program PNPM tidak hanya berupa pembangunan fisik saja, akan tetapi digeser untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi warga miskin yang berbasis pemberdayaan masyarakat mandiri. Seperti kegiatan perdagangan, jasa dan industri. Masyarakat di tuntut untuk menciptakan usaha sendiri atau mengembangkan usahanya sendiri. Sehingga masyarakat memiliki peluang untuk berusaha dan sekaligus berupaya meningkatkan kesejahteraannya selain itu masyarakat dapat melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri dalam memberikan kebijakan kredit dilakukan sesuai dengan pedoman umum. PNPM mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan PNPM. Pada kecamatan Pasan di Kabupaten Minahasa Tenggara, PNPM mandiri sudah melakukan kebijakan kredit sejak tahun 2010, dan hal tersebut sudah berjalan dengan cukup baik sampai pada saat ini. Namun masih juga menghadapi beberapa Kendala seperti, keterlambatan pembayaran kembali pinjaman, sebagian kecil tidak mampu melunasi pinjaman bahkan ada yang sudah dikategorikan macet. Adapun Kebijakan kredit yang dilakukan PNPM di kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara disalurkan melalui dibentuknya kelompok-kelompok disetiap desa yang masing-masing anggotanya dilakukan pelatihan terlebih dahulu selama satu (1) tahun yang kemudian setelah mendapat pengalaman selama setahun mereka baru bisa memasukan proposal permohonan peminjaman kredit ke PNPM.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis kebijakan kredit PNPM di kecamatan Pasan kabupaten Minahasa Tenggara, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Kajian Kebijakan Kredit Terhadap Pengambilan Keputusan PNPM di kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar belakang penelitian maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan pinjaman kredit yang di lakukan masyarakat/kelompok belum optimal.
2. Pengembalian pinjaman yang tidak tepat waktu.
3. Terdapat kredit macet
4. **Focus dan Sub Focus**
5. **Focus penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan kredit PNPM Mandiri di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.

1. **Sub focus penelitian**

Dari permasalahan yang spesifik pada PNPM Mandiri di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Dilihat dari sudut pandang memiliki beberapa masalah. Dalam hal ini penelitian akan difokuskan pada prosedur pemberian kredit dalam pengambilan keputusan PNPM mandiri di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana kebijakan kredit terhadap pengambilan keputusan pemberian pinjaman pada PNPM mandiri”

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih spesifik mengenai antar variabel, yaitu :

1. Untuk mengkaji Kebijakan kredit yang dilakukan oleh PNPM sebagai suatu keputusan.
2. **Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pihak Perusahaan

Bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran-pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penyaluran kredit.

1. Bagi Institusi

Dimana hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memperkaya materi-materi yang terkait dengan kebijakan pemberian kredit oleh PNPM mandiri.

1. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai referensi tambahan atau untuk pengembangan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya, dan sebagai bahan pertimbangan perusahaan atau instansi.